

BAB I

PENDAHULUAN

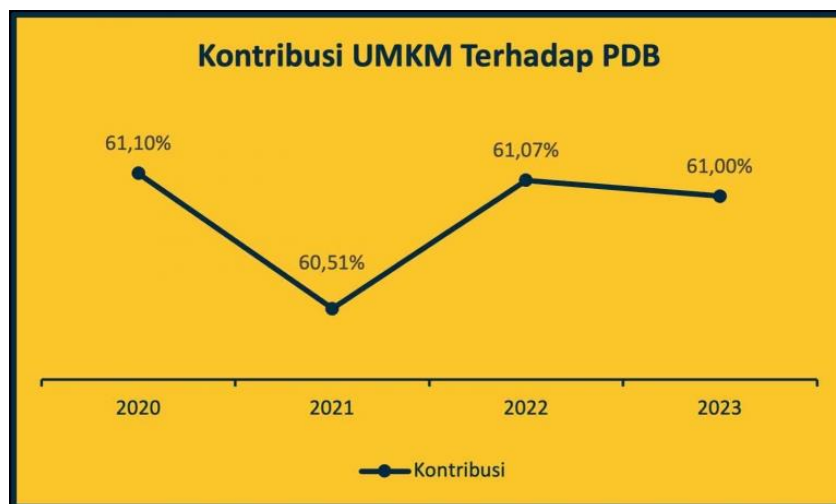
I.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, namun di balik peran pentingnya tersebut, pelaku UMKM masih terus bergulat dengan satu masalah klasik yaitu keterbatasan akses permodalan. Pelaku usaha yang berada jauh dari pusat kota kerap tidak tersentuh oleh layanan perbankan formal, karena jaringan kantor bank memang belum tersebar merata hingga ke pelosok (Teruna & Ardiansyah, 2024). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat *bankability* pelaku UMKM itu sendiri. Saat mengajukan kredit, mereka umumnya dihadapkan pada serangkaian persyaratan administrasi yang cukup berat, sementara pelaku UMKM tidak terbiasa membukukan keuangan usahanya secara rapi, atau bahkan menyusun laporan keuangan formal yang biasanya diminta pihak bank. Belum lagi terkait agunan, yang umumnya mensyaratkan jaminan aset sebelum kredit dicairkan, padahal banyak pelaku UMKM yang memang tidak memiliki aset untuk dijadikan agunan (Teruna & Ardiansyah, 2024). Dua faktor inilah yang menjelaskan mengapa modal usaha tetap menjadi permasalahan paling umum di kalangan pelaku UMKM hingga saat ini.

Persoalan efektivitas penyaluran kredit bagi pelaku UMKM sebenarnya sudah cukup banyak dikaji, meski dengan hasil yang tidak selalu seragam. Misalnya (Suginam, Rahayu, & Purba, 2021), mengkaji dampak penyaluran KUR terhadap kinerja usaha mikro dan kecil, dan menyimpulkan bahwa secara umum program tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinilai efektif. Gambaran berbeda justru muncul dari kajian (Syamsudin, Tulus, & Londa, 2022), yang mengamati penyaluran KUR pada komunitas nelayan. Kajian tersebut menemukan bahwa manfaat program belum dirasakan secara merata oleh masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran, dan di lapangan justru ditemukan praktik-praktik yang menyimpang dari prosedur seharusnya, mulai dari minimnya keterbukaan informasi sampai proses persetujuan kredit yang tidak konsisten. Adanya dua hasil kajian yang bertolak belakang ini menunjukkan bahwa klaim

“efektif” pada suatu program KUR tidak serta-merta berlaku untuk konteks lainnya sehingga penting untuk menguji ulang efektivitas ini pada objek yang berbeda, termasuk pada bank penyalur terbesar seperti BRI.

Di luar persoalan teknis penyaluran kredit, akar masalah keterbatasan modal ini juga bisa ditelusuri dari ketimpangan pemerataan hasil pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena hasil pembangunan belum dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat, banyak orang akhirnya memilih membuka usaha sendiri, sebagai jalan untuk menambah penghasilan. Dari sinilah UMKM tumbuh menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam skala besar sekaligus ikut mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Yolanda & Hasanah, 2024). Besarnya peran ini tergambar dari data bahwa lebih dari separuh PDB Indonesia atau sekitar 61% disumbangkan oleh sektor UMKM, dengan hampir seluruh angkatan kerja produktif, yakni sekitar 97%, bergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian mereka (Yolanda & Hasanah, 2024). Ironisnya, kontribusi sebesar itu belum diimbangi dengan akses pembiayaan yang memadai. Data yang sama juga menunjukkan bahwa sekitar 46,6 juta unit dari 64 juta unit bahkan belum pernah tersentuh layanan pembiayaan dari lembaga keuangan sama sekali (Yolanda & Hasanah, 2024).

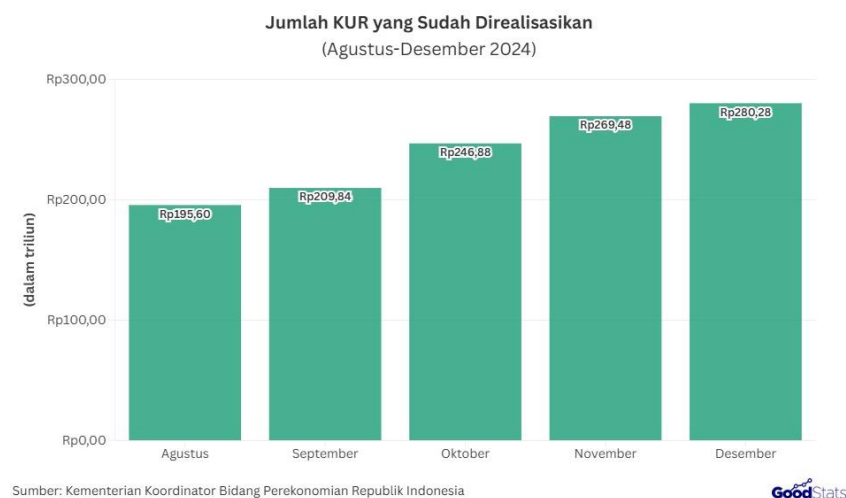


Sumber: Kompasiana.com

Gambar 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berlandaskan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2007. Program KUR tersebut dirancang sebagai skema pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah, disalurkan melalui lembaga keuangan baik perbankan maupun *non-bank*, dengan tujuan membuka akses permodalan yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2008, Kredit Usaha Rakyat adalah fasilitas kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi, dalam bentuk modal kerja maupun investasi untuk kegiatan usaha produktif, dengan mekanisme penjaminan dari lembaga terkait.



Sumber: goodstats.id

Gambar 2. Jumlah Penyaluran KUR Nasional 2024

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga dimuat di laman *goodstats.id*, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional pada tahun 2024 mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10% dari target tahun 2024. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebagai bank penyalur KUR terbesar secara konsisten mencatatkan porsi penyaluran tertinggi dari total realisasi nasional tersebut. Berdasarkan Laporan Tahunan BRI tahun 2024, penyaluran KUR Mikro BRI pada tahun 2024 telah mencapai Rp184,98 triliun atau 99,72% dari kuota yang diberikan oleh Pemerintah, dengan plafon yang disesuaikan menjadi Rp185,5 triliun, target debitur baru sebanyak 1,7 juta debitur, dan target debitur graduasi sebanyak 1,05 juta debitur.

Meskipun angka penyaluran KUR oleh BRI terus meningkat dari tahun ke tahun, adanya perbedaan hasil dari kajian-kajian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa besarnya nominal penyaluran kredit tidak secara otomatis mencerminkan

efektivitas suatu program. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan KUR di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebagai bank penyalur terbesar masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat masih ada kesenjangan antara pertumbuhan volume penyaluran dengan pemahaman mendalam mengenai proses dan mekanismenya benar-benar berjalan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ilmiah ini disusun dengan judul “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Pengembangan UMKM pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk”.

I.2 Tujuan

Adapun tujuan penulisan dalam kajian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
2. Untuk mengetahui perkembangan jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
3. Untuk mengetahui efektivitas program KUR di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
4. Untuk mengetahui hasil analisis efektivitas penyaluran KUR bagi pengembangan UMKM.

I.3 Manfaat

Adapun manfaat dari kajian ilmiah ini bagi penulis, bagi perusahaan dan bagi akademisi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Kajian ilmiah ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi di Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan, serta menambah wawasan dan pemahaman Penulis mengenai mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat di perbankan, khususnya pada PT Bank Rakyat Indonesia Pesero Tbk.

b. Bagi Pembaca

Kajian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan menambah pengetahuan bagi Pembaca mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya terkait proses penyaluran dan efektivitasnya dalam mendukung pengembangan UMKM melalui institusi perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank

Hasil kajian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam meningkatkan efektivitas proses penyaluran KUR, sehingga program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Kajian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai implementasi program KUR di lapangan, sehingga pemerintah dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan UMKM yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.